



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCAIRAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 23
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 Juni 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 14.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing
Acara	: Evaluasi Keselamatan Penerbangan dan Laik Udara Pesawat-pesawat, Kebijakan Penerapan Tarif Pesawat dan Penanganan Ground Handling, Subsidi Bidang Angkutan Udara, Kesiapan Navigasi Udara Seluruh Indonesia dan Kendala yang dihadapi.
Ketua Rapat	: H. Syaifullah Tamliha, S.Pi.,M.S
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik & Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirut LPPNPI (AIRNAV), Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara, Kepala LPPNPI, Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II pada hari ini adalah membahas tentang kendala yang dihadapi Transportasi Angkutan Udara.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Kepala LPPNPI untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara, LPPNPI (AIRNAV), dan Operator Bidang Transportasi Udara agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan; keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan; termasuk pengawasan kelaikudaraan pesawat udara; pembangunan dan operasional infrastruktur Bandara yang ramah kepada lansia dan *disabilitas*.
2. Terhadap kebijakan penerapan tarif pesawat udara, Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara melakukan evaluasi komponen biaya operasi yang mempengaruhi tarif pesawat udara agar selain menjaga keberlangsungan usaha maskapai dari persaingan tidak sehat, tetapi juga menjamin penumpang agar mendapat harga tiket yang wajar dan terjangkau, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara dan Operator Bidang Transportasi Udara untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR RI, antara lain:
 - a. Ketepatan waktu dan keamanan dalam penanganan *groundhandling* utamanya penanganan bagasi penumpang pesawat udara;
 - b. Meminimalisir *delay* pesawat udara;
 - c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana bandara untuk meningkatkan layanan kepada penumpang diantaranya garbarata; *golf car*; kebersihan toilet; pemisahan Mushola pria dan wanita.
 - d. Evaluasi pelaksanaan subsidi penerbangan perintis.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB.

Jakarta, 28 Juni 2022

PIMPINAN RAPAT,



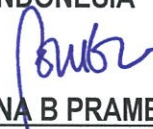
SYAIFULLAH TAMLIHA

PLT DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



NUR ISNIN ISTIARTONO

DIRUT LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA



POLANA B PRAMESTI